

The effect of Clarity on Budget Targets, Compliance with Laws and Regulations, Accounting Controls, And Reporting Systems on The Performance Accountability of Government Agencies

Sri Wahyu Ningsih¹, Muhammad Yusuf², Tutut Dwi Andayani³

^{1,2,3} Department of Accounting, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Indonesia

 sriiyuni04@gmail.com

Abstract

This study aimed to determine the effects of clarity on budget targets, compliance with laws and regulations, accounting controls, and reporting systems on the performance accountability of government agencies. This study used multiple linear regression analysis methods with a quantitative approach. The population of this research was the Regional Apparatus Organization (OPD) in the Pekalongan. The sample was taken using a purposive sampling technique. The results showed that partially the clarity of budget targets, compliance with laws and regulations, accounting controls, and reporting systems had significant effects on the performance accountability of government agencies. Simultaneously, the clarity of budget targets, compliance with laws and regulations, accounting controls, and reporting systems had significant effects on the performance accountability of government agencies.

Keywords: *accountability for government agency performance , accounting controls, clarity of budget targets, compliance with laws and regulations, reporting systems.*

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara simultan menunjukkan kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata kunci : *akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan*

1. Pendahuluan

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Penetapan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pelaksanaan dari PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja atas pelaksanaan APBN/APBD. Berdasarkan hasil evaluasi analisis capaian LAKIP Kota Pekalongan tahun 2018 mendapat predikat BB (sangat baik) yang artinya akuntabel, berkinerja baik memiliki manajemen kinerja yang andal. Namun capaian kinerja instansi pemerintah Kota Pekalongan seharusnya masih bisa ditingkatkan lagi secara menyeluruh. Dan masih terdapat beberapa aspek atau indikator kinerja daerah yang masih belum tercapai atau tidak terealisasi, hal tersebut tercantum dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 yaitu terdapat 75 indikator kinerja daerah dengan prosentase 46 indikator tercapai (61,33%), 26 indikator tidak tercapai (34,67%) dan 3 indikator belum tersedia data (4%).

Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan sejauhmana tujuan anggaran yang dibuat secara spesifik dan jelas dimengerti oleh siapa yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Adanya anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik juga. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian [6] yang menyatakan bahwa secara parsial kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun berbeda dengan penelitian Pratama dkk (2019) yang menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Kecamatan Padang Pariaman).

Menurut Hafiz [17] ketaatan pada peraturan diartikan kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang untuk mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Akuntabilitas kinerja di Indonesia diatur dalam Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunan LAKIP diatur dalam Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ketaatan pada peraturan perundangan yang dijalankan setiap instansi akan meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian [13] yang menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh [18] yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menurut [27] pengendalian akuntansi dapat menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut telah ekonomis, efisien dan efektivitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, ini merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Tercapainya indikator tersebut merupakan prestasi yang dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

bersangkutan. Penelitian [7] yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan berbeda dengan penelitian [36] yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem pelaporan merupakan tanggung jawab untuk memberikan informasi atas tindakan yang dilakukan dalam penggunaan anggaran terhadap pihak internal, eksternal atau pihak yang berkepentingan. Dalam penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (APIP) ada beberapa komponen yang dinilai yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja. Sistem pelaporan yang baik juga diperlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja instansi pemerintah dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan oleh [21] menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian [5] menyatakan hal sebaliknya yaitu sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Pekalongan dengan judul penelitian **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pemerintah Kota Pekalongan”**.

2. Literatur Review

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yogi Isnanto dan Bambang Widarno pada tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Untuk membedakan dengan penelitian tersebut maka peneliti menambah satu variabel yaitu ketaatan pada peraturan perundangan karena variabel tersebut diduga mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Alasan peneliti menambahkan variabel tersebut karena sertiap instansi harus mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh lembaga atau pejabat negara yang memiliki wewenang agar dapat menyusun, melaporkan laporan kinerja secara periodik seperti yang dicantumkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014. Ketaatan pada peraturan perundangan dapat meningkatkan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu peneliti ini menganalisis dan membuktikan secara empiris bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hal lain yang membedakan penelitian ini yaitu ruang lingkup penelitian dan sampel dalam penelitian, lokasi yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu di 17 SKPD Kabupaten Sukoharjo dengan sampel penelitian yaitu Kepala Dinas, Kepala Bagian Keuangan, dan Sekretaris Keuangan sehingga total sampel berjumlah 51. Namun pada penelitian ini dilakukan pada 18 OPD di Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dengan sampel penelitian yaitu Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Renval), Sekretaris Keuangan dan Bendahara sehingga total sampel berjumlah 90.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena lebih menerapkan pengujian teori dengan menggunakan numerik data variabel dan menggunakan teknik analisis dalam pengujian hasil datanya. Penelitian dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari – Juni 2022. Populasi dari penelitian ini yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Subjek penelitian ini adalah 18 OPD yang dijadikan sebagai sampel, pada setiap OPD diambil 5 (lima) sampel dengan kriteria sebagai berikut : (1) Pegawai Negeri Sipil yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, (2) Pegawai Negeri Sipil yang menempuh pendidikan minimal diploma 3, (3) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Kepala Dinas/Badan/Instansi, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi (Renval), Bendahara, Sekretaris Keuangan dan atau pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran.

Data yang digunakan merupakan data primer berupa opini subjek yang dikumpulkan secara individual dari responden dengan cara membagikan kuesioner secara langsung kepada responden, kuesioner berisi daftar pertanyaan yang terdiri dari pernyataan-pernyataan pada setiap variabel beserta alternatif jawaban yang diajukan kepada responden, selain itu kuesioner juga berisi identitas responden. Kemudian untuk pengolahan data digunakan aplikasi SPSS versi 24. Dalam analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan untuk pengujian data dilakukan uji validitas, uji reliabilitas. Pada uji asumsi klasik dilakukan uji normalitas Kolmogorov smirnov, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda serta dalam pengujian hipotesis dilakukan uji t dan uji f dan pengujian terakhir dilakukan uji koefisien determinasi R².

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan pada 18 OPD yaitu badan, dinas dan lembaga teknis daerah di pemerintah Kota Pekalongan, dari setiap OPD diambil lima sampel responden yang memenuhi kriteria sehingga kuesioner yang dibagikan sebanyak 90 kuesioner namun yang kuesioner yang kembali dan dapat diolah sejumlah 80. Distribusi frekuensi jawaban responden terhadap variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden

Variabel	No. Item	Kriteria Penilaian										N	%
		STS		TS		N		S		SS			
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%		
Kejelasan Sasaran Anggaran	X1.1	0	0,00	0	0,00	2	2,50	45	56,25	33	41,25	80	100
	X1.2	0	0,00	0	0,00	3	3,75	45	56,25	32	40,00	80	100
	X1.3	0	0,00	0	0,00	3	3,75	48	60,00	29	36,25	80	100
	X1.4	0	0,00	0	0,00	0	0,00	48	60,00	32	40,00	80	100
	X1.5	0	0,00	0	0,00	1	1,25	42	52,50	37	46,25	80	100
	X1.6	0	0,00	3	3,75	15	18,75	39	48,75	23	28,75	80	100
	X1.7	0	0,00	0	0,00	4	5,00	37	46,25	39	48,75	80	100
	Rata-rata	0,00		0,54		5,00		54,29		40,18		100	

	X2.1	0	0,00	1	1,25	1	1,25	43	53,75	35	43,75	80	100
	X2.2	0	0,00	0	0,00	6	7,50	40	50,00	34	42,50	80	100
	X2.3	0	0,00	0	0,00	5	6,25	41	51,25	34	42,50	80	100
Ketaatan pada Peraturan Perundangan	X2.4	0	0,00	0	0,00	1	1,25	39	48,75	40	50,00	80	100
	X2.5	0	0,00	0	0,00	3	3,75	32	40,00	45	56,25	80	100
	X2.6	0	0,00	1	1,25	4	5,00	41	51,25	34	42,50	80	100
	X2.7	1	1,25	1	1,25	4	5,00	42	52,50	32	40,00	80	100
	Rata-rata	0,18		0,54		4,29		49,64		45,36		100	
	X3.1	0	0,00	1	1,25	7	8,75	43	53,75	29	36,25	80	100
	X3.2	0	0,00	0	0,00	1	1,25	47	58,75	32	40,00	80	100
	X3.3	0	0,00	0	0,00	4	5,00	47	58,75	29	36,25	80	100
Pengendalian Akuntansi	X3.4	0	0,00	1	1,25	5	6,25	46	57,50	28	35,00	80	100
	X3.5	0	0,00	0	0,00	2	2,50	40	50,00	38	47,50	80	100
	X3.6	0	0,00	0	0,00	5	6,25	37	46,25	38	47,50	80	100
	X3.7	0	0,00	2	2,50	1	1,25	45	56,25	32	40,00	80	100
	X3.8	0	0,00	0	0,00	3	3,75	43	53,75	34	42,50	80	100
	Rata-rata	0,00		0,63		4,38		54,38		40,63		100	
	X4.1	0	0,00	1	1,25	1	1,25	44	55,00	34	42,50	80	100
	X4.2	0	0,00	0	0,00	1	1,25	53	66,25	26	32,50	80	100
Sistem Pelaporan	X4.3	0	0,00	2	2,50	4	5,00	48	60,00	26	32,50	80	100
	X4.4	0	0,00	4	5,00	3	3,75	43	53,75	30	37,50	80	100
	X4.5	0	0,00	1	1,25	2	2,50	41	51,25	36	45,00	80	100
	Rata-rata	0,00		2,00		2,75		57,25		38,00		100	
	Y.1	0	0,00	0	0,00	2	2,50	36	45,00	42	52,50	80	100
	Y.2	0	0,00	0	0,00	1	1,25	40	50,00	39	48,75	80	100
	Y.3	0	0,00	0	0,00	1	1,25	48	60,00	31	38,75	80	100
	Y.4	0	0,00	0	0,00	1	1,25	37	46,25	42	52,50	80	100
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Y.5	0	0,00	0	0,00	1	1,25	43	53,75	36	45,00	80	100
	Y.6	0	0,00	0	0,00	1	1,25	40	50,00	39	48,75	80	100
	Y.7	0	0,00	0	0,00	1	1,25	52	65,00	27	33,75	80	100
	Y.8	0	0,00	0	0,00	2	2,50	44	55,00	34	42,50	80	100
	Y.9	0	0,00	1	1,25	6	7,50	46	57,50	27	33,75	80	100
	Y.10	0	0,00	0	0,00	1	1,25	49	61,25	30	37,50	80	100
	Rata-rata	0		0,13		2,13		54,38		43,4		100	

Sumber : Data primer diolah, 2022

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Deskriptif Statistik Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kejelasan_Sasaran_Anggaran	80	25	35	30.39	3.188
Ketaatan_pada_Peraturan_Perundangan	80	24	35	30.76	3.234
Pengendalian_Akuntansi	80	28	40	34.80	3.538
Sistem_Pelaporan	80	12	25	21.56	2.469
Akuntabilitas_Kinerja_Instansi_Pemerintah	80	35	50	44.10	4.199
Valid N (listwise)	80				

Sumber: Output yang diolah SPSS,(2022)

Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif untuk variabel Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1) diperoleh nilai minimum 25 dan nilai maximum 35 memiliki rata-rata (*mean*) yaitu 30,39 dengan standar deviasi sebesar 3,188. Pada variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan (X_2) diperoleh nilai minimum 24 dan nilai maximum 35 memiliki rata-rata (*mean*) yaitu 30,76 dengan standar deviasi sebesar 3,234. Pada variabel Pengendalian Akuntansi (X_3) diperoleh nilai minimum 28 dan nilai maximum 40 memiliki rata-rata (*mean*) yaitu 34,80 dengan standar deviasi sebesar 3,538. Pada variabel Sistem Pelaporan (X_4) diperoleh nilai minimum 12 dan nilai maximum 25 memiliki rata-rata (*mean*) yaitu 21,56 dengan standar deviasi sebesar 2,469. Pada variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) diperoleh nilai minimum 35 dan nilai maximum 50 memiliki rata-rata (*mean*) yaitu 44,10 dengan standar deviasi sebesar 4,199.

Uji Validitas

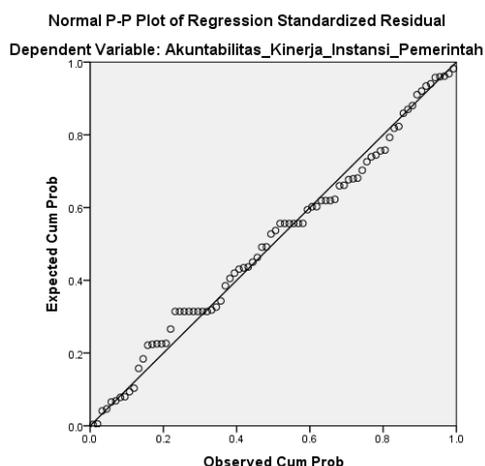
Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah kuesioner penelitian dapat digunakan atau tidak, yang sebenarnya harus diukur dengan pernyataan atau alat ukur dapat mengukur indikator-indikator suatu obyek pengukuran. Sebuah kuesioner dapat dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Dari penelitian ini diperoleh R hitung dari setiap instrument melebihi R tabel yang nilainya 0,220 sehingga dapat dinyatakan pertanyaan dalam kuesioner ini adalah valid.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan uji reliabilitas diperoleh nilai *Cronbach alpha* pada variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,891, ketaatan pada peraturan perundangan sebesar 0,872, pengendalian akuntansi sebesar 0,885, sistem pelaporan sebesar 0,851 dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,929 dari setiap variabel melebihi nilai *Cronbach alpha* 0,60 sehingga dapat dinyatakan kuesioner dalam penelitian ini reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji grafik yaitu dengan uji grafik yaitu dengan melihat *normal probability plot* pada model penelitian yang dilakukan. Selain itu uji normalitas juga dapat dilakukan secara statistik yaitu dengan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*.



Gambar 1. Grafik Normal P-Plot

Berdasarkan uji normal probability plot bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena telah memenuhi asumsi normalitas. Untuk mendukung hasil pengujian normalitas secara grafik, hasil pengujian statistik diketahui bahwa Asymp. Sig (2-tailed) adalah sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas yang apabila didapatkan nilai tolerance >0,1 dan nilai VIF <10

[Tabel 3.](#) Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.463	2.566		2.519	.014		
Kejelasan_Sasaran_Anggaran	.332	.162	.252	2.042	.045	.222	4.511
Ketaatan_pada_Peraturan_Perundanan	.362	.143	.279	2.529	.014	.277	3.605
Pengendalian_Akuntansi	.255	.127	.215	2.001	.049	.292	3.423
Sistem_Pelaporan	.351	.174	.206	2.021	.047	.323	3.092

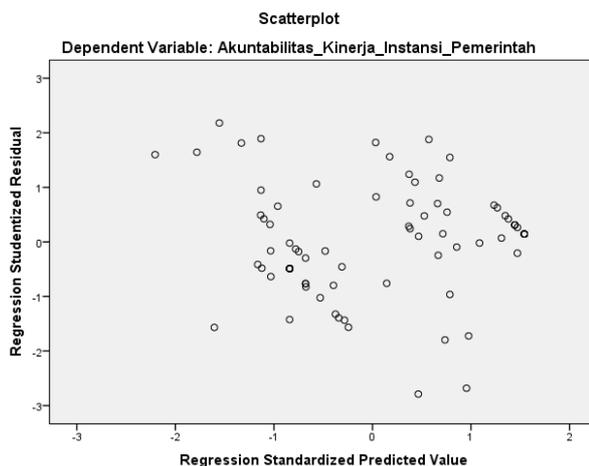
a. Dependent Variable: Akuntabilitas_Kinerja_Instansi_Pemerintah

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* setiap variabel > 0,10 atau nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.



[Gambar 2.](#) Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar grafik *scatterplot* diatas dapat dilihat titik-titik lingkaran kecil kecil menyebar secara acak serta tersebar diatas maupun di bawah angka 0, titik titik tersebut tidak membentuk pola tertentu, serta menyebar di atas dan di bawah angka nol sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig. .014
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.463	2.566		2.519	
Kejelasan_Sasaran_Anggaran	.332	.162	.252	2.042	.045
Ketaatan_pada_Peraturan_Perundangan	.362	.143	.279	2.529	.014
Pengendalian_Akuntansi	.255	.127	.215	2.001	.049
Sistem_Pelaporan	.351	.174	.206	2.021	.047

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, maka dapat diketahui persamaan regresi linier bergandanya, yaitu:

$$Y = 6,463 + 0,332 X_1 + 0,362 X_2 + 0,255 X_3 + 0,351 X_4$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (a) = 6,463 menunjukkan nilai positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan dependen, dimana jika semua nilai variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran (X₁), ketaatan pada peraturan perundangan (X₂), pengendalian akuntansi (X₃), dan sistem pelaporan (X₄) bernilai 0 persen atau tidak mengalami perubahan, maka variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) adalah 6,463.
2. Koefisien X₁ (b₁) = 0,332 menunjukkan nilai positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Artinya jika variabel lain nilainya tetap dan variabel kejelasan sasaran anggaran semakin meningkat maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat sebesar 0,332 (33,2%).
3. Koefisien X₂ (b₂) = 0,362 menunjukkan nilai positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Artinya jika variabel lain nilainya tetap dan variabel ketaatan pada peraturan perundangan semakin meningkat maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat sebesar 0,362 (36,2%).
4. Koefisien X₃ (b₃) = 0,255 menunjukkan nilai positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Artinya jika variabel lain nilainya tetap dan variabel pengendalian akuntansi semakin meningkat maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat sebesar 0,255 (25,5%).
5. Koefisien X₄ (b₄) = 0,351 menunjukkan nilai positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Artinya jika variabel

lain nilainya tetap dan variabel sistem pelaporan semakin meningkat maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga akan meningkat sebesar 0,351 (35,1%).

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda bahwa variabel yang mendominasi pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu variabel ketaatan pada peraturan perundangan (X₂) karena nilai koefisien nya yang paling tinggi diantara variabel yang lain yaitu sebesar 0,362 (36,2%).

Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen secara parsial atau individual terhadap variabel dependen. Kriteria uji statistik t yang digunakan pada penelitian ini jika nilai signifikansi t (p-value) < 0,05 maka H₀ ditolak dan H₁ diterima, artinya ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dan jika t hitung > t tabel maka H₀ ditolak dan H₁ diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan.

Tabel 5. Hasil Uji t (Parsial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.463	2.566		2.519	.014
Kejelasan_Sasaran_Anggaran	.332	.162	.252	2.042	.045
Ketaatan_pada_Peraturan_Perundangan	.362	.143	.279	2.529	.014
Pengendalian_Akuntansi	.255	.127	.215	2.001	.049
Sistem_Pelaporan	.351	.174	.206	2.021	.047

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji t diatas maka dapat dijelaskan rincian hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

1. Kejelasan sasaran anggaran memperoleh signifikansi sebesar 0,045 lebih kecil dari 0,05 dan t hitung sebesar 2,042 lebih besar dari t tabel yaitu 1,665. Hasil uji t pada variabel kejelasan sasaran anggaran tersebut menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut menunjukkan H₁ diterima dan H₀ ditolak, artinya kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Ketaatan pada peraturan perundangan memperoleh signifikansi sebesar 0,014 lebih kecil dari 0,05 dan t hitung sebesar 2,529 lebih besar dari t tabel yaitu 1,665. Hasil uji t pada variabel ketaatan pada peraturan perundangan tersebut menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut menunjukkan H₂ diterima dan H₀ ditolak, artinya ketaatan pada peraturan perundangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Pengendalian akuntansi memperoleh signifikansi sebesar 0,049 lebih kecil dari 0,05 dan t hitung sebesar 2,001 lebih besar dari t tabel yaitu 1,665. Hasil uji t pada variabel pengendalian akuntansi tersebut menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut menunjukkan

H3 diterima dan H0 ditolak, artinya pengendalian akuntansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4. Sistem pelaporan memperoleh signifikansi sebesar 0,047 lebih kecil dari 0,05 dan t hitung sebesar 2,021 lebih besar dari t tabel yaitu 1,665. Hasil uji t pada variabel sistem pelaporan tersebut menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil tersebut menunjukkan H4 diterima dan H0 ditolak, artinya sistem pelaporan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hasil uji t diatas variabel yang mendominasi pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu variabel ketaatan peraturan perundangan karena nilai signifikansi yang diperoleh paling kecil dari nilai signifikansi variabel yang lain yaitu sebesar 0,014 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung sebesar 2,529 lebih besar dari t tabel yaitu 1,665. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang mendominasi pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipenelitian ini adalah variabel ketaatan pada peraturan perundangan.

Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Kriteria pengujian hipotesis menggunakan uji F adalah jika nilai signifikansi < 0,05 maka Ha diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Selain membandingkan nilai signifikansi, pada uji F ini juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai f hitung dengan f tabel, apabila nilai f hitung > f tabel maka Ha diterima.

Tabel 6. Hasil Uji F (Simultan)

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1041.426	4	260.356	55.509	.000 ^b
	Residual	351.774	75	4.690		
	Total	1393.200	79			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas_Kinerja_Instance_Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Kejelasan_Sasaran_Anggaran, Ketaatan_pada_Peraturan_Perundangan, Pengendalian_Akuntansi, Sistem_Pelaporan

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji f dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk model penelitian ini adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan f hitung sebesar 55,509 > f tabel sebesar 2,499. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinan (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Range nilainya antar 0-1, apabila nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, dan sebaliknya apabila R^2 besar berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen besar.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.865 ^a	.748	.734	2.166

a. Predictors: (Constant), Kejelasan_Sasaran_Anggaran, Ketaatan_pada_Peraturan_Perundangan, Pengendalian_Akuntansi, Sistem_Pelaporan

b. Dependent Variable: Akuntabilitas_Kinerja_Instance_Pemerintah

Sumber: Data primer diolah, 2022

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, besarnya nilai *Adjusted R Square* adalah 0.734 yang berarti sebesar 0.734 atau (73,4%) variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan mampu menjelaskan atau menggambarkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan sisanya sebesar 26,6% lainnya dijelaskan atau digambarkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji t pada variabel kejelasan sasaran anggaran diperoleh t_{hitung} sebesar 2,042 lebih besar dari t tabel yaitu 1,664 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,045 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti **H₀ ditolak** dan **H₁ diterima** sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran **berpengaruh** signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran terbukti meningkat secara jelas sehingga meningkat pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dikarenakan pegawai instansi pemerintah sudah memahami dengan benar mengenai tugas dan tanggungjawab dalam pekerjaannya serta pengukuran kinerjanya sudah sesuai dengan standar sehingga alokasi tujuan anggaran dapat dicapai dan indikator kinerja instansi pemerintah akan tercapai. Pemerintah Kota Pekalongan telah menerapkan dan melakukan kejelasan sasaran anggaran dengan baik dan maksimal, hal ini terlihat dari pegawai instansi pemerintah sudah memahami dengan benar mengenai tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Dalam melakukan pekerjaannya, pegawai mampu memenuhi jangka waktu yang tersedia dengan sasaran pekerjaan yang lebih dari satu dan sasaran yang menantangpun bisa diselesaikan. Setiap instansi memiliki standar atau prosedur dalam menjalankan tata kelolanya, karena pegawai sudah memahami pekerjaannya sehingga akuntabilitas kinerjanya meningkat dengan bukti kinerjanya tercapai, sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan bisa mencapai rencana strategik.

Pernyataan tersebut didukung jawaban para responden pada kuesioner yang menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab pernyataan pada indikator kejelasan sasaran anggaran dengan kriteria “sangat setuju” sebesar 40,18% dan rata-rata responden yang menjawab dengan kriteria “setuju” sebesar 54,29%. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian oleh [6], [21], [25] [32], yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji t pada variabel ketaatan pada peraturan perundangan diperoleh t_{hitung} sebesar 2,529 lebih besar dari t tabel yaitu 1,664 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,014 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti **H_0 ditolak** dan **H_2 diterima** sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ketaatan pada peraturan perundangan **berpengaruh** signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil ini menunjukkan bahwa variabel ketaatan pada peraturan perundangan terbukti meningkat sehingga meningkat pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan dalam menjalankan tata kelola pemerintahannya sudah berpedoman dan menaati peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari prosedur yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah menggunakan PP No. 12 Tahun 2019 pengganti PP No. 58 Tahun 2005. Serta diimplementasikannya kode etik akuntan Indonesia seperti integritas, objektivitas, kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan konsistensi yang dimiliki oleh setiap pegawai. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan harus menaati peraturan perundangan yang berlaku, untuk mencerminkan bahwa pemerintah telah melakukan tata kelola dengan baik dan sesuai dengan prosedur sehingga kinerja yang tercapai bisa dipertanggungjawabkan.

Pernyataan tersebut didukung jawaban para responden pada kuesioner yang menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab pernyataan pada indikator ketaatan pada peraturan perundangan dengan kriteria “sangat setuju” sebesar 45,36% dan rata-rata responden yang menjawab dengan kriteria “setuju” sebesar 49,64%. Penelitian ini sejalan dengan penelitian [8], [11], [13], [36] yang menyatakan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji t pada variabel pengendalian akuntansi diperoleh t_{hitung} sebesar 2,001 lebih besar dari t tabel yaitu 1,664 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,049 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti **H_0 ditolak** dan **H_3 diterima** sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian akuntansi **berpengaruh** signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian akuntansi terbukti meningkat sehingga meningkat pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengendalian akuntansi berperan penting dalam tata kelola pemerintahan karena untuk mengevaluasi dan mengontrol kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sudah berjalan dengan efektif dan efisien. Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan dan menerapkan pengendalian akuntansi dengan baik dan maksimal dan dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Hal ini terlihat dari diimplementasikannya pembagian wewenang yang jelas agar tidak terjadinya rangkap jabatan disuatu instansi untuk mencegah kecurangan ataupun kekeliruan dalam melakukan tugasnya. Penyajian informasi akuntansi juga disertai dengan bukti yang memadai serta diberikannya jangka waktu dalam melakukan pekerjaan agar data yang dihasilkan akurat dan tepat waktu, karena fungsi dari pengendalian akuntansi itu untuk memantau apakah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan telah berjalan efisien dan efektif. Pemerintah Kota Pekalongan juga memperhatikan apakah hubungan antar pimpinan dan pegawai maupun antar pegawai sudah berjalan dengan baik karena hubungan baik yang terjalin akan mendukung kinerja pegawai dalam bekerja.

Pernyataan tersebut didukung jawaban para responden pada kuesioner yang menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab pernyataan pada indikator

pengendalian akuntansi dengan kriteria “sangat setuju” sebesar 40,63% dan rata-rata responden yang menjawab dengan kriteria “setuju” sebesar 54,38%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [5],[6], [7], [21], [31] dan [32] yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil uji t pada variabel sistem pelaporan diperoleh t_{hitung} sebesar 2,021 lebih besar dari t tabel yaitu 1,664 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,047 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti **H₀ ditolak** dan **H₄ diterima** sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pelaporan **berpengaruh** signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil ini menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan terbukti meningkat sehingga meningkat pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam pemerintahan pelaporan dapat menunjukkan bahwa kegiatan atau aktivitas yang dilakukan telah berjalan dengan baik dan penggunaan anggarannya sudah sesuai, pelaporan tersebut bisa berupa pelaporan keuangan maupun pelaporan kinerja. Sistem pelaporan di Pemerintah Kota Pekalongan telah diterapkan dengan baik dan maksimal. Hal ini terlihat dari diimplementasikannya penyajian laporan keuangan secara lengkap dan informasi keuangan yang digunakan dapat menjadi alat koreksi jika terjadi kesalahan dimasa lalu. Laporan keuangan juga ditujukan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi yang tentunya laporan keuangan tersebut dapat diuji kebenarannya serta mudah dipahami oleh pihak yang bersangkutan. Pada dasarnya pelaporan keuangan yang baik dapat menunjukkan kinerja setiap pegawai atau instansi baik atau tidak, pelaporan yang baik akan menunjukkan kinerja yang baik sehingga akuntabilitas kerjanya meningkat, begitupun sebaliknya.

Pernyataan tersebut didukung jawaban para responden pada kuesioner yang menunjukkan bahwa rata-rata responden menjawab pernyataan pada indikator sistem pelaporan dengan kriteria “sangat setuju” sebesar 38% dan rata-rata responden yang menjawab dengan kriteria “setuju” sebesar 57,25%. Hal ini sejalan dengan penelitian [6], [7], [11], [21], [31] dan [36], yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 5 (H_5) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara simultan **berpengaruh** signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan F hitung yaitu sebesar 55,509 lebih besar dari F tabel yaitu sebesar 2,499 sehingga hipotesis 5 (H_5) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau dinyatakan *diterima*. Selain itu, hasil uji koefisien determinasi juga menunjukkan bahwa besarnya nilai *Adjusted R Square* adalah 0.734 yang berarti sebesar 0.734 atau (73,4%) variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan mampu menjelaskan atau menggambarkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemilihan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sudah baik karena mampu mewakili atau menjelaskan variabel dependen sebesar 73,4% dan sisanya sebesar 26,6% dijelaskan atau digambarkan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh [6], [7], [21] dan [32] menyatakan bahwa secara simultan variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan menurut mengemukakan bahwa secara simultan variabel ketaatan pada peraturan dan variabel sistem pelaporan juga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah [11], [36].

5. Kesimpulan

1. Kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekalongan. Sehingga H_1 diterima.
2. Ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekalongan. Sehingga H_2 diterima.
3. Pengendalian akuntansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekalongan. Sehingga H_3 diterima.
4. Sistem pelaporan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekalongan. Sehingga H_4 diterima.
5. Kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekalongan. Sehingga H_5 diterima.
6. Koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,734. Hasil ini dapat diartikan bahwa 73,4% variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel independent yaitu kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan, sedangkan sisanya sebesar 26,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain.

Referensi

- [1] A.A Anwar Prabu Mangkunegara, "Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan," *PT Remaja Rosdakarya*, 2005.
- [2] Agustin, Karismawati, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi kasus Pada SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta)," *Naskah Publikasi*, 2018.
- [3] Amalia, Siti Hartini, "Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus pada OPD Pendidikan dan Kebudayaan, OPD Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Sekretariat DPRD)," *Jurnal Penelitian Universitas Politeknik Negeri Sriwijaya. Thesis*, 2017.

- [4] F. Anzany, “Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pengalaman Audit, Persepsi Mutasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Inspektorat Kabupaten Batang),” *Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan*, 2019.
- [5] R. D. Anastasia, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan),” *E-prints Politeknik Negeri Sriwijaya*, 2018.
- [6] R. R. R. A. T. Anindita, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Ketaatan Peraturan Perundangan dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Medan,” *Repository Institusi Universitas Sumatera Utara*, 2021.
- [7] D. Aprilianti, M. Wulan, & H. Kurniawan, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, *9*(2), 150–159, 2020.
- [8] D. Asmawanti, A. M. Sari, V. Fitranita, & I. O. Wijayanti, “Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah,” *Journal of Applied Accounting and Taxation*, *5*(1), 85–94, 2020.
- [9] Bastian, Indra, “Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar,” *Erlangga*, 2010.
- [10] Darman, “Keuangan Daerah. Kejelasan Sasaran Anggaran,” 2015.
- [11] E. Dewata, Y. Sari, H. Jauhari, T. D. Lestari, & P. N. Sriwijaya, “Ketaatan pada peraturan perundangan, sistem pelaporan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, *8*(3), 541–550, 2020.
- [12] R. H. Fauzan, A. Nasir, & S.P. Silalahi, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKPD Kab Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat),” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi (JOM FEKON)*, *4*(1), 1122-1136, 2017.
- [13] T. Febrianti, & Indrawati Yuhertiana, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,” *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, *14*(1), 137–146, 2021.
- [14] R. D. Fitriana, N. Hidayati, & M. C. Mawardi, “Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo,” *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, *07*(02), 91–103, 2018.
- [15] S. M. Fuad, M. Yusuf, & T. Purwanto, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Komitmen Organisasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pembangkit

- Listrik Tenaga Mini PT. Hidro Rizki Ilahi Lebakbarang,” *Jurnal UMPP*, 18 (01), 102-117, 2022.
- [16] Ghozali, Imam, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25,” *Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang*, 2018.
- [17] M. Hafiz, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating (SKPD Kabupaten Kampar),” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi (JOM FEKON)*, 4(1), 2017.
- [18] J. R. Hasibuan, “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada SKPD Padang Lawas),” *Repository Institusi Universitas Sumatera Utara*, 2018.
- [19] W. Ilamin, “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan),” *Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan*, 2018.
- [20] *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. (1999). Diambil dari <http://kt-jateng.kejaksanaan.go.id/uploads/peraturan/Inpres-1999-7.pdf>
- [21] Y. Isnanto, S. Suharno, B. Widarno, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*,” Vol.15. 489-501, 2019.
- [22] P. IPDN, “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kajian Perencanaan,” *perencanaan.ipdn.ac.id*, 2011.
- [23] Kemenkeu. “*Pemerintah Konsisten Jaga Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara 08 September 2021*,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021.
- [24] I. Kenis, “Effect on Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance,” *The Accounting Review*, Vol. LIV, No. 4, pp:707-721, 1979.
- [25] Kharismawati, Becty. “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat),” *Jurnal Penelitian Universitas Komputer Indonesia*, 2017.
- [26] Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, “Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,” Jakarta, 2003.
- [27] Mardiasmo, “Akuntansi Sektor Publik,” Yogyakarta : *Andi Offset*, 2018.

- [28] Pemerintah Kota Pekalongan, “*Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021*,” *Scribd.com*, 2021.
- [29] Pemerintah Kota Pekalongan, “*Rancangan Akhir RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026*,” 2021.
- [30] Pemkot Pekalongan, “Raih WTP 6 Kali Berturut-Turut, Pemkot Pekalongan Terima Penghargaan dari Kemenkeu,” *pekalongankota.go.id*, 2021.
- [31] R. Pratama, H. Agustin, & S. Taqwa, “Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 429–444, 2019.
- [32] D. D. Precelina, E. Wuryani, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang,” *Jurnal Akuntansi AKUNESA. Vol 7. No 3*, 2019.
- [33] P. J. Rahakbuw, & S. Firdaus, “Akuntabilitas: Menuju Indonesia Berkinerja,” *rbkunwas.menpan.go.id*, 2018.
- [34] Republik Indonesia. “Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),” *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, 2014.
- [35] Rusdiana dan Nasihudin, “Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Penelitian,” Bandung: UIN SGD, 2018.
- [36] N. H. Safitri, “*Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten)*,” 19–151, 2020.
- [37] R. Semarang, “Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemkot Pekalongan Raih Predikat BB,” *radarsemarang.jawapos.com*, 2020.
- [38] E. Setiawan, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,” *E-Jurnal Akuntansi. Vol. 1 No. 1. 1-14*, 2013.
- [39] V. Shufiana, “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Pekalongan),” *Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan*, 2019.
- [40] Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,” Bandung : ALFABETA, 2012.

- [41] S. A. Tanta, “Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Motivasi Sebagai variabel Intervening pada Kawasan Industri Medan,” *Tesis: Universitas Sumatera Utara*, 2008.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
